



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan  
website: <http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>  
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 5(2),  
99-116

## PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLIKASINYA PADA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA SELACAU KECAMATAN BATUJAJAR

**Oom Yomi Romlah, Feni Awati Darmana, Taufik Rahman**

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi  
[resvik.soreey8@gmail.com](mailto:resvik.soreey8@gmail.com)

Naskah diterima : 12 Januari 2023, Naskah direvisi : 22 Mei 2023, Naskah disetujui : 25 Juli 2023

### ABSTRAK

Rendahnya pemahaman mengenai politik pada sebagian masyarakat, dan maraknya praktek politik uang yang dilakukan calon kontestan pilkades dan berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian, (1) Pendekatan yang dilakukan partai Nasional Demokrat menggunakan pendekatan persuasif dan humanis kepada berbagai komunitas, tokoh masyarakat, dan organisasi, (2) Pendidikan politik berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik meningkat, baik dalam pemilu, dalam pembuatan kebijakan, dan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam program pembangunan di Desa Selacau. (3) Faktor pendorong partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik, telah memahami karakteristik, budaya politik dan keinginan masyarakat dalam melaksanakan hak politiknya, ditunjang oleh tersedianya sarana prasarana dan adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor pendidikan, sensitivitas agama, terbatasnya jangkauan dalam mensosialisasikan program ke pelosok desa, dan masih adanya oknum partai yang menggunakan politik uang dalam menarik simpati masyarakat.

**Kata Kunci :** Partai Politik, Partisipasi Politik Masyarakat, Pendidikan Politik.

### ABSTRACT

This research is motivated by the low understanding of politics in some communities and the widespread practice of money politics by prospective Pilkades contestants, which has implications for people's political participation. The method used in this study is descriptive qualitative data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study: (1) The approach taken by the National Democratic party in providing political education to the people in Selacau Village uses a persuasive and humanist approach to various communities, community leaders, and organizations; (2) Political education carried out by the National Democratic party as a means of political communication, means of political socialization, means of political recruitment, and means of conflict management have implications for people's political participation, so that the level of community involvement in the political process increases, both in elections, in making policies, and being able to synergize with the government in development programs in Selacau Village. (3) The driving factor for the National Democratic Party in providing political education is understanding the characteristics, political culture, and the will of the people to exercise their political rights, supported by the availability of infrastructure and support from the government. At the same time, the inhibiting factors are education, religious sensitivity, limited outreach in socializing the program to remote villages, and the presence of party members who use money politics to attract public sympathy.

**Keywords:** Community Political Participation, Political Education, Political Parties.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi, yang mana partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dan esensial dalam praktik demokrasi. Bentuk perwujudan dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia yaitu melalui pemilihan umum (pemilu). Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah berhasil membangun wajah demokrasi ke arah yang lebih baik, dan mampu membuktikan kepada dunia bahwa pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan sukses.

Keberhasilan pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, baik sebagai pemilih maupun partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di daerah maupun di tingkat pusat. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa proses demokrasi sedang berjalan. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Besar kecilnya partisipasi masyarakat tetap menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pemilu, dan partisipasi masyarakat dapat menentukan kualitas dari pemilu itu sendiri, dalam praktiknya partisipasi masyarakat memiliki keragaman yang diantaranya dapat berupa

partisipasi dalam memilih, partisipasi dalam pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas dari demokrasi dan slogan yang terkenal dari Lincoln yaitu *government of the people, by the people, for the people* (Hafidz, 2019).

Fenomena pemilihan kepala daerah Pilkada pada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pilkada serentak pada 270 daerah untuk memilih gubernur di 9 Provinsi dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten dan walikota di 37 dari 98 kota, diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan hak suara atau dikenal sebagai golongan putih (golput) ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, hal tersebut terjadi salah satunya karena wabah pandemi COVID-19. Selain daripada itu ada juga bentuk ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap para calon pemimpinnya, diantaranya ketika para pemimpin banyak mengeluarkan janji politik dalam masa kampanye, yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat, yaitu pada saat masa kontestan pemilihan kepala daerah (Voa Indonesia 10/12/2020).

Data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Jawa Barat mengenai Indeks Demokrasi bahwa provinsi Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah 49,94 Juta jiwa, dengan demikian Jawa Barat memiliki potensi partisipasi politik masyarakat yang besar jika melihat

kepada angka kepadatan penduduk tersebut. Berdasarkan indeks demokrasi dapat diketahui bahwa partisipasi politik dalam pemilu yang bebas dan adil hal ini karena pada dasarnya angka tersebut tidak memenuhi kriteria koridor demokrasi ketika keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pilkada yang demokrasi dapat dikatakan mencapai angka 8 persen atau lebih, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah tingkat kepedulian dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemimpinnya, adanya faktor lain yaitu ketidakadilan dalam berpolitik seperti jual beli politik, mahar politik dan lain sebagainya yang menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat kepada para pemerintah atau pemimpin tersebut, perlunya perhatian secara khusus dari pihak berwenang untuk mengembalikan kembali indeks demokrasi tersebut, meskipun hak memilih dan dipilih cukup tinggi, namun partisipasi politik dalam pemilu yang bebas dan adil mengalami penurunan atau datar.

Jumlah partisipasi dan antusias masyarakat terhadap pilkades, diantaranya Desa Selacau memiliki total 11.530 jumlah penduduk, dengan 3.300, lalu hak pilih memiliki 6000 (Daftar Pemilih Tetap), dan masyarakat yang memilih untuk melakukan golongan putih (golput) berjumlah 3000 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah permasalahan yang terjadi juga pada partisipasi masyarakat di Desa Selacau, yang dimana desa tersebut secara kebutuhan demokrasi dapat dikatakan belum memenuhi standar demokrasi yang hanya 52% hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya berada dalam angka 70% dan seterusnya sehingga dapat dikatakan memenuhi standar demokrasi. Mulyadi

menjelaskan lebih lanjut keterlibatan partai politik yang memberikan pendidikan politik pada masyarakat di Desa Selacau, adanya pendidikan politik melalui sosialisasi dari partai politik pada masyarakat dapat memberikan dampak-dampak tertentu yang salah satunya adalah mendorong menimbulkan antusias terhadap masyarakat bahwa pemilihan kepala desa ini adalah sesuatu hal yang penting dapat menentukan perkembangan Desa Selacau lima tahun kedepan. Baik dan buruknya calon pemimpin kepala desa, ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Permasalahan di atas menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai politik, sehingga pendidikan politik merupakan hal yang penting, salah satu agen yang berfungsi memberikan sosialisasi dan pendidikan politik pada masyarakat yaitu partai Politik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) menjelaskan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Melakukan pendidikan politik, menyalurkan aspirasi politik anggotanya, dan juga merupakan salah satu kewajiban partai politik. Adapun partisipasi politik terwujud dengan

keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya, dan yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik. bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan (Adisasmita, 2014, hlm. 4).

Rendahnya pemahaman politik, partisipasi politik masyarakat, dan masih terjadinya pelanggaran etika dalam pemilu, menyebabkan pentingnya pendidikan politik pada masyarakat, sebagai upaya memberikan pemahaman politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui lembaga-lembaga yang menunjang suksesnya pemilihan kepala desa, salah satunya adalah melalui peran partai politik.

## METODE

Adapun metode penelitian ini merupakan kualitatif, berupa penelitian dengan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial, deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu

metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa realistik yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Bradway, 2016).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, agar dalam penelitian yang dilakukan dapat mengungkapkan sejumlah fakta yang terkait dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan mengenai keberlangsungan partisipasi politik masyarakat Desa Selacau secara deskripsi. Serta peneliti dapat melakukan penelitiannya secara mendalam mengetahui peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik dan implikasinya pada partisipasi politik masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penghimpunan data yang telah didapat, maka akan dipaparkan pembahasannya pada berikutnya.

### 1. Pendekatan yang Dilakukan Partai Nasional Demokrat dalam Memberikan Pendidikan Politik pada Masyarakat di Desa Selacau.

Makna partisipasi dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan bagian dari pola bermasyarakat bagi bangsa Indonesia, meskipun istilah itu adakalanya diganti dengan peran keikutsertaan. Partisipasi tidak berjalan secara mekanik, ini membutuhkan dasar motivasi yaitu kepercayaan terhadap pemerintah yang diwakili oleh pelakunya, penyelenggara pemerintah. Dengan kata lain, harus

simpatik, relatif bersih dan jujur serta mampu mengembangkan tugasnya, tidak otoriter.

Masalah peran partai politik dan fungsinya dalam Undang-undang No.2 tahun 2008, tentang partai politik yang fungsi salah satunya adalah pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Republik Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta sebagai pencipta iklim yang kondusif, sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat, dan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik warganegara Indonesia.

Pendekatan politik sebagai signifikansinya maka masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi politik yang dimana tidak hanya sebatas pemilihan umum saja, namun secara nalar sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah desapun dilakukan oleh partai politik merupakan sebuah kewajiban mengingat peran partai politik yang di atur dalam undang-undang tersebut. Ada beberapa upaya yang dilakukan partai Nasional Demokrat untuk menumbuhkan partisipasi politik masyarakat di Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendekatan politik yang Partai Nasional Demokrat lakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh DH selaku ketua umum DPC partai Nasional Demokrat yaitu dengan pendekatan secara persuasif. Contohnya sudah banyak calon-calon kepala desa, gubernur dan lain sebagainya yang sudah mempermosikan dirinya

walau tidak secara langsung di media-media yang ada, seperti televisi, koran, radio, internet dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi kebanyakan parpol menginginkan hal instan, kebanyakan partai politik ketika akan mencalonkan baru datang kepada masyarakat. Namun, yang dilakukan di Nasional Demokrat sering bersilaturahmi atau pendekatan secara humanis kepada berbagai komunitas, pendekatan secara humanis yaitu gerakan yang dilakukan oleh hati Nurani contohnya komunitas petani maka solusinya berkumpul dengan petani. Secara tidak langsung ketika kita melakukan rapat, masyarakat itu enggan untuk bicara, tetapi jika datang langsung kepada suatu komunitas berdiskusi dengan terbuka luas, ketika melakukan diskusi dan pendekatan terhadap komunitas petani misalkan, tidak perlu lagi membahas ataupun menjelaskan mengenai partai politik, karena keberangkatan seorang yang berada dalam partai politik dipandang oleh masyarakat maka akan terbawa sendiri dengan tema diskusi yang diberikan, maka masyarakat akan memandang sebagai orang-orang politik.

Pemaparan di atas sejalan dengan definisi persuasif politik dalam komunikasi politik menurut Cengara, (2011, hlm. 270) yaitu:

Suatu kegiatan yang selalu ada dalam dunia perpolitikan adalah persuasif politik merupakan sifat dari persuasi, sementara dalam kamus ilmiah populer persuasi adalah tenaga meyakinkan, bujukan, bentuk karangan yang menguraikan suatu masalah atau keadaan yang dibuktikan dengan data dan fakta yang bertujuan membujuk atau mengajak yang

mempengaruhi pembaca, sementara itu untuk pengertiannya adalah meyakinkan, lunak, tanpa kekerasan. Mengenai persuasif politik, ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para komunikator politik menjalankan misi persuasifnya. Biasanya setiap negara berbeda-beda mengenai peraturan tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi negara masing-masing. Itu ditujukan agar persuasif politik dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan, apalagi jika komunikasi yang dirugikan. Tujuan utama dalam persuasif adalah untuk menimbulkan perasaan responsif pada orang lain (dalam dunia politik maka komunikasi atau masyarakat). Ada tiga pemahaman tentang proses persuasif. Pertama, persuasi biasanya melibatkan tujuan, suatu usaha komunikator untuk mencapai tujuan melalui pembicaraan. Kedua, bersifat dialektis, dan yang ketiga, memiliki bentuk tanggapan.

Sejalan dengan pendapat di atas menjelaskan bahwa persuasif politik adalah suatu ajakan, bujukan, rayuan, dengan bentuk tanpa kekerasan yang dilakukan oleh para politikus sebagai komunikator kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat memberikan dukungan, respon, simpati terhadap dirinya dalam hal kekuasaan dalam ruang lingkup desa. Dalam kehidupan sehari-hari, persuasif politik lebih sering terlihat ketika menjelang suatu pemilihan umum, dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi dari suatu daerah bahkan negara. Contoh, sudah banyak calon-calon kepala desa, gubernur wali kota bahkan presiden yang

sudah mempermosikan dirinya walau tidak secara langsung di media-media yang terlihat, seperti televisi, koran, radio, dan internet, hal tersebut dilakukan agar partai politik dapat menarik simpati dari masyarakat itu sendiri.

Humanisme yang dilakukan partai politik Nasional Demokrat sesuai dengan Alfian dalam Kartono (2000, hlm. 97), yaitu:

Pendidikan politik dalam arti yang lebih ketat dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal, bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru." Dengan demikian pendidikan politik masyarakat adalah merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, selama ini mengalami gelombang pasang surut yang luar biasa. Pendidikan politik juga merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, dinamis dan efisien.

Pemaparan di atas dapat ditemukan bahwa pendekatan pendidikan politik dalam ruang lingkup lebih ketat salah satunya menerapkan pendekatan pendidikan politik yang humanis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Pendekatan humanis dalam pendidikan politik apabila merujuk kepada KBBI, merupakan pendekatan yang menganggap manusia sebagai objek terpenting yang harus diperlakukan dengan baik agar terwujud pergaulan hidup yang lebih baik. Dengan melakukan pendekatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman baru dan memiliki kesadaran politik, yaitu menjadi masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendekatan tersebut dapat menumbuhkan pemahaman politik dan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memahami bagaimana idealnya berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itupun merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan yang ada dalam politik Desa Selcau ketika mendapatkan ketidakadilan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desanya termasuk memajukan Desa Selcau melalui masyarakat yang sadar politik.

Pemaparan di atas juga sesuai dengan tujuan partai politik yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Pasal 11 tentang partai politik yaitu:

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Indonesia, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan landasan tersebut, partai politik manapun memiliki cita-cita yang ingin di capai dalam menjalankan kehidupan berpartainya, karena pada prinsipnya yang peneliti temui di lapangan, partai Nasional Demokrat tidak hanya melakukan tindakan persuasif yang negatif, melainkan ingin menunjukan kepada masyarakat dan mencontohkan apa yang harus di lakukan dalam bersosial di masyarakat, yang di kuatkan oleh contoh pendekatan secara Humanis untuk mendapatkan hati masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mencontoh para figur tersebut untuk menumbuhkan partisipasi politik.

## **2. Implikasi Pendidikan Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Selcau**

Partisipasi merupakan salah satu ciri warganegara yang baik, tidak ada alasan bagi seorang warganegara untuk tidak berpartisipasi, karena partisipasi merupakan sebuah keseharusan warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warganegara berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wasistiono (dalam Nurmalina dan Syaifullah,

2008) menyebutkan bahwa adanya rasa kesukarelaan, adanya keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Persepsi masyarakatpun mengenai politik yaitu masyarakat sudah mulai mengerti, berbeda dengan zaman dahulu pada masa orde baru, siapa yang dipilih presiden dan gubernur, sekarang sudah pemilihan langsung oleh masyarakat mereka tahu mana putra daerah dan yang bukan, karena masyarakatpun setidaknya masih ada yang awam dan tidak mengerti mengenai siapa yang akan menjadi calon pemimpin tersebut. Jika orang yang sudah paham, untuk kedua periodenya memang cara untuk menarik simpatinya memang tidak diiming-imingi dengan materi, jadi lebih melakukan pendekatan yang lebih akrab lagi. DM melanjutkan pandangan masyarakat terhadap politik dapat dikatakan memang ada yang menganggap bagus, ada yang menganggap juga tidak bagus seperti janji-janji saja. Jadi ada yang Pro dan Kontra, yang seperti sudah dikatakan bahwa dari salah satu masyarakat yang berbeda pilihan partai politiknya cenderung mengajak warga lain yang awam agar sesuai dengan pemikirannya, karena mereka yang kontra kurang memahami tentang partai, tujuan partai, arah partai. Pemaparan di atas menjelaskan tentang perilaku politik, hal ini sejalan dengan Amir, (2013, hlm. 26) yaitu:

Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, ada yang menentang dan ada yang menaati serta mempengaruhi

dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegak kebijakan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia di pengaruhi oleh budaya masyarakat

Pendapat di atas ditemukan bahwa sudut pandang masyarakat berbeda-beda tentang politik, maka dari itu dibutuhkan interaksi antara aktor-aktor politik dari pihak tertentu untuk membenahi stigma masyarakat yang asalnya terbelakang menjadi lebih maju, untuk perkembangan demokrasi itu sendiri, dari teori di atas dapat menjelaskan secara gamblang 'kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia di pengaruhi oleh budaya masyarakat' itu sendiri yang berarti budaya masyarakat di desa tersebut masih harus dibenahi oleh aktor-aktor politik demi menumbuhkan pemahaman mengenai perpolitikan itu sendiri. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat yaitu:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik, salah satu tugas dari partai politik menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang, dalam masyarakat modern yang begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang tersebut atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas. Apabila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses ini dinamakan



penggabungan kepentingan, sesudah digabung pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan perumusan kepentingan.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana orang tersebut berada, biasanya proses sosialisasi berjalan secara berkelanjutan dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik, dengan cara melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Serta diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kadernya yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.
4. Partai politik sebagai pengatur konflik, dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang sudah sewajarnya terjadi. Jika sampai terjadi konflik maka partai politik berusaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dengan demikian masyarakat yang mengalami konflik baik sesama masyarakat maupun dengan pemerintah desa dapat ditangani oleh partai sebagai pihak ketiga.

Pemaparan di atas sejalan dengan pendapat Sukarna (1994, hlm. 84), menjelaskan tentang pendidikan politik yaitu:

Pendidikan politik merupakan suatu syarat mutlak mengingat dalam pendidikan politik mendidik kesadaran bernegara dan berbangsa. Partai politik di negara yang belum merdeka sangat mengutamakan pendidikan politik ini sehingga anggota-anggota partai politik punya kader yang tinggi untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam negara yang sudah merdeka, pendidikan politik harus tetap dilakukan agar kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau dijajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus.

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa dengan tugas dan peran dari partai politik tersebut ada implikasi pada masyarakat yang salah satunya menjadi pihak ketiga ketika masyarakat mengalami konflik bahkan mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa atau orang yg memimpin pada masa itu. Melalui partai politik masyarakat di harapkan dapat memahami peran fungsi partai politik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki pemahaman baru tentang politik serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik itu sebagai pengamat, sebagai partisipan politik, bahkan sebagai aktor politik tersebut.

Ketidak sempurnaan kesadaran tentang politik dalam partisipasi politik karena terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan politik itu sendiri sehingga politik dan partisipasi politik

di daerah terkesan berbau dengan uang karena masyarakat tersebut sudah dibudaki dengan uang, tutur DM jika ada pencalonan apa saja seperti caleg, pilkades, atau apa saja masyarakat susah untuk di ajaknya terkecuali jika ada uang, jadi bisa ditarik kesimpulan menurut pengalamannya dimana ada partisipasi disitu ada uang. Karena pada dasarnya budaya yang kurang baik ini masih ada di Desa Selacau seperti politik uang dan lain sebagainya.

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Pemaparan diatas sejalan dengan pendapat Budiarto, (2010, hlm. 370) yaitu:

Partisipasi politik banyak diwujudkan dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya adalah lobbying kegiatan organisasi, mencari koneksi, tindak kekerasan (violence), dan kegiatan pemilih. Kegiatan yang terakhir ini mencakup suara sekaligus sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Secara lebih spesifik, Budiarto mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokrasi karena di dalamnya terdapat keikutsertaan warganegara dalam menentukan segala keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya sesuai dengan masa jabatan yang dipimpinnya selama lima tahun kedepan, maka dari itu sangat penting bagi masyarakat pendidikan politik tersebut, melihat kepada pemaparan di lapangan di atas mengenai masih adanya praktek politik uang, dengan begitu masyarakat tidak akan diperbudak oleh uang dan dipersempit (pembodohan) bagi masyarakat baik secara perilaku politik, pandangan pada politik, dan praktek politiknya, yang tujuannya untuk menghidupkan pesta demokrasi yang ideal di Desa Selacau tersebut. Begitu juga partisipasi politik di Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, seperti yang dikatakan di atas tingkat partisipasi politik masyarakat yang ada di daerah itu bisa terjadi karena didalamnya terkandung materi, dan itu sebenarnya terjadi karena didalamnya terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakannya dan mengambil kesempatan dari berbagai sisi yang menimbulkan kerugian kepada sebagian masyarakat yang sangat awam tersebut. Maka dari itu sangat penting kehadiran pendidikan politik untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Faktor yang menjadi penunjang bagi partisipasi politik masyarakat di Desa Selacau seperti yang sudah dijelaskan oleh tokoh masyarakat yaitu faktor pendorongnya tergantung seberapa dekat dari partai Nasional Demokrat dengan warga desa, sudah memberikan kontribusi apa terhadap pembangunan desa dan sudah sejauh mana yang dapat dikatakan

cukup warga yang terbantu oleh partai tersebut, sehingga yang menjadi faktor pendorong selain dari pada ketangkasan partai tersebut juga pola komunikasi dari partai. Kunci utamanya adalah karakter sosial warga masyarakat, seberapa sadar taraf masyarakat dalam pemahaman karakter sosial, maka dari itu sudah menjadi salah satu kewajiban aktor politik menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat, untuk memberikan pemahaman bahwa politik itu tidak selamanya menyeramkan. Hal tersebut sejalan dengan Pasaribu, (2017, hlm. 57) tentang definisi pendidikan politik yaitu:

Pendidikan politik merupakan usaha untuk mengarahkan proses pendidikan politik masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang diinginkan adalah Demokrasi Pancasila. Pendidikan politik memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang sadar politik dan mau berpartisipasi dalam politik demi mewujudkan suatu tatanan politik yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam mewarnai sistem politik Demokrasi Pancasila.

Pendapat di atas dapat menunjukkan bahwa pendidikan politik hadir untuk mengarahkan warga negara kepada tatanan sistem politik yang ideal, yang berarti salah satu bagian dari pelaksanaannya adalah karakter sosial, jika karakter sosial sudah mencapai kesadaran sebagai warganegara pemilih aktif dalam politik, maka akan menjadikan hal positif untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu sangat penting bagi antar tokoh politik, pemerintahan, lembaga

dan lain sebagainya untuk merawat komunikasi politik dengan masyarakat, karena dengan cara itu masyarakat dapat terbuka pandangan terhadap politik yang dimana hidup dalam bermasyarakat itu merupakan bagian dari politik itu sendiri.

Faktor yang menjadi penghambat bagi partisipasi politik masyarakat di Desa Selacau diantaranya dari masyarakat itu sendiri yang awam akan politik, keterbatasan jangkauan komunikasi politik dari partai hingga ke pelosok-pelosok desa. Dan juga dari oknum masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan partai politik yang saling menjatuhkan antar sesama partai politik serta menghasut para masyarakat. Lebih rinci lagi yaitu selama masyarakat masih bermasalah dengan toleransi beragama, maka akan menjadi efek besar terhadap pendidikan atau perkembangan politik yang seharusnya politik dan agama adalah dua hal yang harus dipisahkan, alasannya adalah jika berpolitik dikaitkan dengan agama maka penyelesaiannya adalah dengan cara ekstrimis dan akan merugikan salah satu pihak di agama tertentu, sebaliknya jika di politik di kaitkan erat dengan agama maka tidak akan ada penyelesaian yang moderat karena dalam politik tidak hanya menyangkut satu atau dua agama saja, melainkan kepercayaan baik itu dinamisme maupun animisme yang setiap orang berbeda keyakinannya. Akan tetapi melihat kepada zaman sekarang agama banyak yang dipolitisasi baik secara pemahaman dan teknis, sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat yang awam gampang terombang-ambing dengan isu-isu politik yang belum tentu teruji kebenarannya, dan hal itu juga yang menyebabkan masyarakat tidak berkeinginan memahami pemikiran

mengenai politik. Begitu pula dengan masyarakat yang tidak jarang menjumpai praktik oligarki, hal ini tentu berkaitan dengan ekonomi yang dimana, masyarakat menjumpai praktik politik uang dan kampanye hitam yang pada dasarnya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat yang jauh dari sosialisasi politik enggan untuk menerima pendidikan politik karena sebagian orang menganggap bahwa politik itu adalah uang dan kekuasaan. Hal tersebut sejalan dengan teori Siswoyo, (1994, hlm. 15) tentang definisi pendidikan politik yaitu:

Pendidikan politik adalah transfer secara sadar pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan politik juga merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai-nilai, dan norma norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa terbatasnya keterjangkauan sosialisasi politik dari partai kepada masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Desa Selacau dapat dimaknai bahwa permasalahan masyarakat adalah kurang mendapatkan pendidikan politik melalui sosialisasinya lembaga yang telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan politik sangat penting karena untuk memberikan transfer ilmu yang bermanfaat dari generasi satu dan selanjutnya baik dalam

pengetahuan, nilai-nilai, norma dan lain sebagainya agar masyarakat dapat terbuka wawasannya dalam menggunakan hak politiknya.

### **3. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik di Desa Selacau**

Tujuan dasar dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi sesungguhnya berakar kuat dalam budaya dari tiap manusia yang bebas dan nampaknya bukan merupakan suatu dorongan yang mendasar dari sifat manusia itu sendiri. Membangun partisipasi politik masyarakat di Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat diperlukan kerjasama yang baik dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan partai politik. Berdasarkan hasil penelitian, sejauh mana sosialisasi yang dilakukan partai tersebut pada masyarakat Desa Selacau. Pernyataan divisi bidang komunikasi dan publik partai Nasional Demokrat mengatakan bahwa, sosialisasi yang dilakukan partainya dapat dikatakan cukup baik, karena partai tersebut memberikan bukti bukan hanya sekedar janji, karena hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dari berbagai desa yang memiliki dukungan dari partai termasuk Desa Selacau, dari memperbaharui jalan, memberikan peralatan kebutuhan petani, dan bantuan lainnya yang sudah diberikan oleh partai, jadi ketika di tanya sejauh mana, maka divisi tersebut akan menjawab sudah cukup baik partai Nasional Demokrat dalam memberikan pembinaan dan pengadaan di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori komunikasi politik yang dimana merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam pendekatan politik menurut Cangara, (2009: 35) yaitu:

Suatu proses dari pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Pemaparan di atas ditemukan bahwa, adanya hal penting dalam sosialisasi ini yaitu keterkaitan atau kedekatan partai Nasional Demokrat pada masyarakat, dan tokoh masyarakat. Pada sosialisasi kali ini partai tersebut melakukan dengan cukup baik sehingga tertanam bukti nyata dari sosialisasi ini bukan hanya sekedar janji. Karena hal ini lah yang dibutuhkan masyarakat dari sosialisasi partai politik.

Partisipasi politik memiliki faktor yang dalam membangun partisipan dari masyarakat diantaranya yaitu faktor penghambat dan pendorong bagi partisipasi politik masyarakat. Faktor-faktor yang ditemukan dalam membangun partisipasi politik masyarakat di Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat diantaranya muncul penghambat dan pendorong. Setelah melakukan wawancara kepada narasumber partai Nasional Demokrat khususnya pada wakil ketua bidang komunikasi dan publik yaitu Herry, dan Usep, mengalami hambatan seperti:

#### **a. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat seseorang untuk berpartisipasi sebagian besar timbul dari dalam dirinya sendiri, hal ini akan terjadi karena kurangnya jangkauan sosialisasi program secara menyeluruh pada masyarakat yang mengakibatkan

kurangnya pengetahuan. Sebagian masyarakat yang masih sangat awam terhadap politik, jadi belum mengerti seperti apa yang dikatakan berpartisipasi itu, maka masyarakat tersebut malah menghimbau warga yang lainnya untuk tidak ikut-ikutan dalam hal perpolitikan. Faktor penghambat tersebut diantaranya:

1. Faktor pendidikan yang memang menjadi penghambat masyarakat untuk membangun partisipasi masyarakat, faktor pendidikan bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi jadi yang paling menghambat itu kurangnya cakupan atau jangkauan mensosialisasikan program.
2. Dilapangan sendiri banyak oknum-oknum dari partai-partai yang saling mencari simpatisan, dengan cara misalnya ada salah satu partai yang mengajak-ngajak, dengan mengiming-imingi baik itu dengan materi, sembako, pangan dan ada juga dengan janji-janji manis yang palsu.
3. Jika pengurus partai tidak mau turun langsung kepada masyarakat maka program se bagus apapun, masyarakat tidak akan berjalan lancar dan tidak akan timbul rasa kebersamaan dan lain sebagainya
4. Protes dari oknum masyarakat contohnya adu argumen sesama pemegang partai. Maka dari itu partai tidak boleh langsung berbicara mengenai politik. Konsolidasi santai lebih di utamakan.

Pemaparan yang dilakukan oleh wakil ketua bidang komunikasi dan publik partai Nasional Demokrat menjelaskan tentang faktor penghambat partainya dalam melaksanakan pendidikan politik untuk

menumbuhkan partisipasi di masyarakat disamping itu juga sebagian pengurus dari partai misalnya pengusaha, tokoh pemuda yang menggerakannya untuk membangun partisipasi politik masyarakatnya agar bisa memberantas kebodohan politik, agar masyarakat dapat melek politik.

#### **b. Faktor Pendorong dan Penunjang**

Keinginan seseorang untuk ikut serta dalam suatu kegiatan tergantung pada muatan tujuan yang hendak dicapai dalam program tersebut dan motivasi yang diberikan oleh penggagas program. Partisipasi atas dasar kesadaran merupakan motivasi yang harus di sampaikan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, sehingga masyarakat, pemerintah desa dan partai politik secara optimal ikut serta dan bertanggung jawab pada pelaksanaan setiap kegiatan.

Hasil wawancara dengan wakil ketua bidang komunikasi dan publik partai Nasional Demokrat yaitu HR dan US diantaranya:

1. Hasil observasi faktor pendorongnya hampir kebanyakan yang menjadi pendorong utama adalah materi atau uang.
2. Seperti yang sebelumnya di sampaikan hal yang menjadi pendorong atau penunjang pada partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah melakukan pendekatan kita akan tahu *culture* seperti apa yang sebenarnya masyarakat inginkan agar tingkat partisipasi di masyarakat bisa tumbuh dan berkembang.

3. *Public speaking* sebagai daya jual pada masyarakat agar menarik minat, jika anggota partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkhusus wakil ketua bidang komunikasi dan publik maka harus memiliki daya jual yang salah satunya adalah cara berbicara, dan gaya berbicara. Jika hal tersebut sudah dikuasai maka tidak sedikit masyarakat akan tertarik pada orang tersebut.

4. Penampilan tentu merupakan salah satu hal utama dalam berbicara di banyak orang untuk proses pemiguran diri

5. Media adalah salah satu tonggak utama dalam hidup bersosial, karena masyarakat sekarang akan mencari info partai melalui media terlebih dahulu, maka masyarakat sedikit banyak nya akan mencari info di ranah tersebut, dengan demikian tugas partai Nasional Demokrat salah satunya adalah menunjukkan citra sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam media sosial.

Pemaparan di atas menjelaskan tentang faktor pendorong partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik yang sejalan dengan teori Kartono, (2009, hlm. 68-69), tentang tujuan pendidikan politik yaitu:

Apabila pendidikan politik tersebut dilakukan dengan baik, secara sistematis dan sesuai harapan, maka pasti akan menumbuhkan kekuatan-kekuatan kontra yang demokratis dan positif konstruktif. Bahwa kekuatan yang kritis untuk melawan kondisi-kondisi yang tidak sehat, buruk, tidak adil, tidak mantap, dan

tidak wajar. Kemudian ada yang berusaha menciptakan iklim yang lebih demokratis dan lebih sehat, untuk membuat kondisi sosial-politik-ekonomi-budaya menjadi lebih baik. Adanya pendidikan politik pasti terdapat maksud atau tujuan yang mendasari.

Pendapat di atas memaparkan tentang tujuan politik, dapat ditemukan bahwa dari faktor pendorong dan penunjang yang dialami oleh partai tersebut berpeluang untuk mewujudkan masyarakat kritis dan dapat bersinergi dengan pemerintahan desa, seperti ikut andil dalam memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, berorientasi bersama mewujudkan Desa Selacau yang lebih maju kedepannya. Dengan demikian akan membuat rakyat mampu memahami situasi sosial-politik di Desa Selacau, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi pemerintah desa ketika dalam kondisi yang tidak baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuannya meliputi (aspek kognitif, wawasan, kritis, dan keterampilan politik). dan yang terakhir agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Berdasarkan pembahsan di atas dapat peneliti temukan bahwa tanggapan masyarakat pada politik di Desa Selacau yang pada intinya tanggapan tersebut menjelaskan kebermanfaatan dari keterlibatan partai politik untuk keberlangsungan demokrasi di Desa Selacau, diantara masyarakat yang berawal dari tidak paham mengenai politik menjadi paham akan proses proses politik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa

hal yaitu partisipasi politik dimana tidak hanya sebatas pemilihan umum saja, namun secara nalarpun dapat bersinergi dengan pemerintah desa, yang dilakukan oleh partai politik merupakan sebuah kewajiban mengingat peran partai politik yang di atur dalam Undang-undang No.2 tahun 2008, tentang partai politik.

Berdasarkan pembahasan di atas ditemukan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik yaitu dengan menggunakan pendekatan persuasif dan humanis kepada berbagai komunitas, tokoh masyarakat, dan organisasi yang ada di Desa Selacau, pendekatan ini lebih memudahkan partai untuk memberikan pemahaman politik, memahami karakteristik, budaya politik, dan keinginan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Masyarakat memiliki kepercayaan dan merasa tertarik dengan sukarela untuk mengikuti sosialisasi politik. Hal itu disebabkan pendekatan tersebut menganggap manusia sebagai objek terpenting yang harus diperlakukan dengan baik agar terwujud pergaulan hidup yang lebih baik yang sesuai dengan asas perikemanusiaan.

Pendidikan politik yang dilakukan partai Nasional Demokrat dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik, ditemukan memiliki implikasi pada partisipasi politik masyarakat, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat khususnya dalam proses politik meningkat, baik dalam pemilu, mempengaruhi perumusan kebijakan, dan bersinergi dengan pemerintah dalam program pembangunan di Desa Selacau.

Berdasarkan pembahasan di atas ditemukan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat yang berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat. Pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan partai politik lebih sesuai digunakan dalam pendidikan politik sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik ditemukan menjadi faktor pendorong atau penunjang, dengan pendekatan tersebut partai Nasional Demokrat mengetahui dan memahami karakteristik, budaya politik, dan keinginan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dalam menyalurkan aspirasinya, ditunjang dengan tersedianya sarana prasarana serta adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam pendidikan politik yaitu faktor pendidikan, sensitivitas agama, keterbatasan jangkauan dalam mensosialisasikan program ke pelosok desa, dan masih adanya oknum partai yang berupaya menarik simpati masyarakat dengan menggunakan politik uang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran partai politik dalam Pendidikan politik dan implikasinya pada partisipasi politik masyarakat di Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan yang dilakukan partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat di Desa Selacau yaitu menggunakan pendekatan persuasif dan humanis kepada berbagai komunitas, tokoh masyarakat, dan organisasi.
2. Pendidikan politik yang dilakukan partai Nasional Demokrat sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik, berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik meningkat, baik dalam pemilu, mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan bersinergi dengan pemerintah dalam program pembangunan di Desa Selacau.
3. Faktor pendorong partai Nasional Demokrat dalam memberikan pendidikan politik, mengetahui karakteristik, budaya politik dan keinginan masyarakat, tersedianya sarana prasarana dan adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor pendidikan, sensitivitas agama, terbatasnya jangkauan dalam mensosialisasikan program ke pelosok desa, dan masih adanya oknum partai yang berupaya menarik simpati masyarakat menggunakan politik uang.

Partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik yang berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat. Pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan partai politik lebih sesuai digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman kepada



masyarakat agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## REFERENSI

- Agung, O. M. (2021). Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 8(15), 152–169.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada penelitian pendidikan sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial pada pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99–116. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.60>
- Askar Nur. (2013). Urgensi Pendidikan politik dalam menciptakan pemilu damai di sulawesi selatan (pendekatan sosiologipolitik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kamaluddin. (2016). *Pendidikan politik hubungannya dengan partsipasi politik masyarakat desa labuaja kecamatan cenrana kabupaten maros (analisis terhadap pilkada serentak tahun 2015)*. 1–96.
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilukada kota pariaman tahun 2018. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.136>
- Kenlies Era Rosalina Marsudi, S. (2019). Revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti money politic (political education revitalization through the establishment of anti money politic village). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 7(2), 111–121.
- Kewarganegaraan, J., Millah, N. S., Dewi, D. A., Nusantara, U. I., Indonesia, U. P., & Millah, N. S. (2021). Skpp bawaslu sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara. 5(2), 355–363.
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2019). Pendidikan literasi pemilu bagi perempuan pemilih pada pemilu 2019. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. 184–194..
- Maulana, M. (2015). Definisi, Manfaat dan Elemen Penting Literasi Digital. *Seorang Pustakawan Blogger*, 1(2), 1–12. <https://www.muradmaulana.com/2015/12/definisi-manfaat-dan-elemen-penting-literasi-digital.html>
- Muslim, A. (2013). *Faktor-faktor partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan andir pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) jabar 2013*.” [http. Elib. Unikom. Ac. Id/Files/Disk1/639/Jbptunikompp-Gdl ...](http://elib.unikom.ac.id/Files/Disk1/639/Jbptunikompp-Gdl...), 7. <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf>.
- Mustofa, A. (2013). Peran media massa sebagai sarana iklan politik parpol (kajian terhadap kasus surya paloh dan partai nasdem). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 62-69.

- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif ahmad rijali uin antasari banjarmasin. *lhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44-51.
- Sakti, A. M. S., Al-Hamdi, R., & Kurniawan, B. D. (2020). Strategi kampanye partai nasionalis: pengalaman partai nasdem pada pemilu 2019. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 155-185.
- Sari, R. K. (2020). Workshop pendidikan literasi media dalam menangkal hoax di media sosial kepada “komisi pemilihan umum kota tarakan” kalimantan utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 4, 23–28.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah kader pengawas partisipatif daering sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemi covid-19. *Journal Of Character Education Society*, 3(3), 15. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2400/pdf>
- Sitepu, D. E., & Si, M. (2016). Peranan partai politik dalam memberikan pendidikan. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3) 2(1), 1–8.
- Surbakti, L. J. R. (2013). Analisis framing pemberitaan konflik partai nasional demokrat (nasdem) di harian media indonesia dan koran sindo. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2).